



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

---

Judul	: Saksi Ungkap Peran Herman Hery
Tanggal	: Rabu, 02 Juni 2021
Surat Kabar	: Republika
Halaman	: 2

## Saksi Ungkap Peran Herman Hery

Ihsan Yunus disebut mendapat jatah 400 ribu paket bantuan sosial (bensos).

### ■ DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Nama Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, kembali mencuat dalam sidang mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara, terdakwa kasus suap pengadaan bantuan sosial (bensos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Peran politisi PDI Perjuangan itu diungkap oleh mantan kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/5). Juliari didakwa menerima suap Rp 32 miliar melalui Adi dan pejabat pembuat komitmen bensos Kemensos, Matheus Joko Santoso.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Adi Wahyono, pembagian kuota paket bantuan Covid-19 Jabodetabek di antaranya untuk Herman Hery, bekas wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus, dan para pejabat di Kementerian Sosial. Dari arahan Juliari, kuota satu juta paket untuk kelompok Herman Hery, Ivo Wonkareng, Stevano, dkk.

Kemudian, 400 ribu paket untuk Iman Ikram, Ihsan Yunus, Yogas dkk, 300 ribu paket untuk Adi dan pejabat pembuat komitmen (PPK) bantuan Covid-19 Matheus Joko Santoso untuk dikelola bagi kepentingan Bina Lingkungan dan 200 ribu untuk teman dan kerabat Juliari.

Menurut Adi, pembagian per kelompok tersebut untuk bantuan tahap 7-12. "Ada perubahan pola vendor, pertama, Bodetabek sebesar 550 ribu dikerjakan Anomali, itu mulai tahap 7, lalu sebesar satu juta paket dikerjakan kelompok-kelompok perusahaan itu kolega beliau (Juliari), kemudian ada yang 400 ribu dan 200 ribu (paket)," kata Adi.

Adi mengaku, perubahan paket itu setelah dipanggil Juliari ke ruangannya bersama dengan Matheus dan tim teknis mensos Kukuh Ary Wibowo. "Lalu, saya terima kuota dari PIC (*person in charge*) dan cek profilya. Akan tetapi, saya tidak ada kewenangan lagi untuk menentukan kuota dan kuota itu dilaksanakan oleh perusahaan mereka, ada empat kelompok itu," kata Adi.

Terkait tajah Herman, Adi mengaku, pernah ditelepon anggota de-wan itu karena mengurangi jatah kuota PT Anomali Lumbung Artha pada pengadaan bantuan tahap 5. Pada saat itu, Ivo Wongkaren komplain karena penurunan kuota. Adi mengaku terkejut beberapa hari setelahnya ditelepon Herman. "Awalnya saat saya terima telepon, saya tidak tahu siapa yang menelepon karena di *handphone*

saya tidak ada namanya," kata dia. Jatah kuota PT Anomali diku-rangi dari 550 ribu paket menjadi 500 ribu paket karena banyaknya pengusaha lain yang membutuhkan. "Saya kurangi 50 ribu, tapi karena saya dikomplain Pak Ivo Wongkaren jadi saya kembalikan lagi jadi 550 ribu paket," ungkap Adi. Dalam permintaan pemungutan *fee* Rp 10 ribu per paket bantuan kepada para vendor, PT Anomali juga ternyata mendapat pengecualian.

Adi belakangan tahu bahwa Herman Hery terkait dengan PT Anomali Lumbung Artha. "Ternyata PT Anomali belanja di PT Dwibuktika dan satu grup dengan PT Yunatama karena gudangnya sama di BGR, pusat pergudangan di Kelapa Gading," kata Adi. Orang yang bertanggung jawab atas Anomali dan Yunatama adalah Ivo Wongkaren.

Pembicaraan kedua Adi dan Herman terjadi saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus itu pada Desember 2020. Adi mengaku diminta oleh Juliari menghubungi kolega satu partainya itu. "Saat OTT, saya diminta beliau (Juliari) menghubungi koleganya beliau, waktu itu saya telepon Stevano, anaknya Pak Herman Hery," kata Adi. Saat itu, Adi berada di Malang, Jawa Timur, bersama Juliari dan sejumlah pejabat Kemensos lainnya.

"Apakah saudara bicara langsung dengan Herman Hery?" tanya jaksa KPK M Nur Azis.

"Iya. Karena sudah terjadi, ya siap-siap saja, siap-siap menanggung risiko," ungkap Adi.

"Tapi saudara kenal dengan Herman Hery?" "Tidak," jawab Adi. Herman hingga Selasa (1/6) malam, belum menanggapi konfirmasi *Republika* terkait hasil persidangan tersebut.

Herman Hery pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus bantuan pada Jumat (30/4). Saat itu, Herman mengaku, menghormati proses hukum sehingga harus datang untuk melakukan klarifikasi. Ia mengaku mendapat tiga pertanyaan dari penyelidik. "Ya seputar saya sebagai Komisi III dan peran saya di per-usahaan," kata Herman usai dipe-riksa.

Adi yang merupakan saksi kunci kasus itu juga menjelaskan terkait kuota Ihsan Yunus yang kala itu masih wakil ketua Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan. "Kuota 400 ribu Ihsan Yunus, operatornya siapa?" tanya jaksa. Dia menyebut nama Harry Van Sidabukke dan Agustri Yogasmara (Yogas). ■ antara ed: ilham tirta